PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A. EJAH UMRAENI SALAM**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO**
3. NHK : **993311**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.945.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/112 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 651.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI DESTINATOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 70.000.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.216.784.030
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	4.882.784.030
III.	HUTANG	Rp.	185.629.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.697.155.030

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.